



Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman

Sepni Wita^{1*}, Dasmita², Novri Yaldi³

¹PGSD/STKIP Nasional, Indonesia

Email: sepniwita@rocketmail.com

²PGSD/STKIP Nasional, Indonesia

Email: das.mita20@yahoo.com

³PGSD/STKIP Nasional, Indonesia

Email: yaldinovri@gmail.com

Abstract. *This study aims to see the management of strategy and quality of education in Padang Pariaman Regency. The main problems are school age, community economy, community views and support, school governance and community culture. The strategy used is SWOT analysis. This analysis places the situation and conditions as input factors, then grouped according to their respective contributions. Form of policy by implementing an education system such as private schools, the existence of special targets and ongoing coaching. The need for UKM assistance for the community whose development is followed up. There is strict sanctions against educators who are not disciplined and are outside of school during school hours. The principal provides support for teachers to develop human resources, by bringing in various resource persons from various expertise every certain period.*

Keywords: *Evaluation Survey; SWOT Analysis; Snowball Sampling.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk melihat manajemen strategi dan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan utama pada usia sekolah, perekonomian masyarakat, pandangan dan dukungan masyarakat, tata kelola sekolah dan budaya masyarakat. Strategi yang digunakan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Bentuk kebijakan dengan menerapkan sistem pendidikan seperti sekolah swasta, adanya target khusus dan pembinaan yang berkelanjutan. Perlunya bantuan-bantuan UKM untuk masyarakat yang ditindak lanjuti perkembangannya. Adanya pemberian sanksi tegas terhadap para pendidik yang tidak disiplin dan berada di luar sekolah pada jam sekolah. Kepala sekolah memberi dukungan bagi guru untuk mengembangkan SDM, dengan mendatangkan berbagai nara sumber dari berbagai keahlian setiap periode tertentu.*

Kata kunci: *Survey Evaluasi; Analisis SWOT; Snowball Sampling*

PENDAHULUAN

Generasi penerus yang cerdas tidak bisa dilahirkan dengan cara instan, melainkan harus dengan suatu proses pendidikan yang berkelanjutan. Proses pendidikan yang berkelanjutan ini tentu harus didukung oleh semua pihak seperti guru, kepala sekolah, sarana prasarana, pembiayaan, kurikulum dan masyarakat. Informasi yang diterima dari Balitbag Padang Pariaman tanggal 11 Juli 2023, kualitas pendidikan SD dan SMP di Padang Pariaman menempati urutan ke 16 dari 19 kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Barat. Rendahnya kualitas pendidikan ini bisa dilihat dari angka putus sekolah anak-anak

SD dan SMP. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Angka Putus Sekolah SD dan SMP.

No	Tahun	Jumlah	Sekolah
1	2021	0,51	SD
2	2022	0,51	SD
3	2023	0,52	SD
4	2021	1,8	SMP
5	2022	1,9	SMP
6	2023	1,9	SMP

Sumber: Padang Pariaman 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa angka putus sekolah untuk SD memang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan angka putus sekolah di SMP. Meskipun tidak terlalu tinggi namun ini tidak sejalan dengan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Tidak ada alasan bagi anak-anak Indonesia untuk tidak sekolah karena semua tanggung jawab itu seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi keresahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Rendahnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari rendahnya ekonomi masyarakat yang berakibat pada rendahnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Meskipun seharusnya faktor ekonomi ini tidak bisa dijadikan penghalang bagi anak-anak untuk tidak sekolah. Data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Padang tentang pendapatan perkapita masyarakat Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. PDRB Per Kapita ADHB Padang Pariaman Per Tahun.

Tahun	Pendapatan/Tahun	Pendapatan/Perbulan
2020	27.775.660	2.314.664
2021	28.174.000	2.437.883
2022	29.893.000	2.491.083

Sumber: Padang Pariaman 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendapatan rata-rata masyarakat Padang Pariaman memang masih rendah yaitu berada di bawah pendapatan rata-rata Nasional sebesar 5.125.000 per bulan (Bappenas 2022). Hal ini tentu juga menjadi keresahan bagi Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Meskipun data diatas memperlihatkan adanya kenaikan pendapatan, namun kenaikan itu masih di bawah rata-rata pendapatan nasional. Diduga bahwa rendahnya pendapatan ini mempengaruhi angka putus sekolah karena orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan anak-anak mereka untuk sekolah. Besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu akan mempengaruhi besarnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Tabel 3 di bawah ini memperlihatkan pengeluaran perkapita perbulan masyarakat Padang Pariaman.

Tabel 3. Pengeluaran Perkapita Masyarakat Padang Pariaman.

Tahun	Pengeluaran
2020	1.084.305
2021	1.157.737
2022	1.159.411

Sumber: Padang Pariaman 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengeluaran masyarakat per bulan sangat rendah. Rata-rata pengeluaran masyarakat hanya Rp. 41.407 per hari. Maka selain rendahnya pendapatan perkapita, masyarakat Padang Pariaman juga diduga mengalami kekurangan gizi karena hanya Rp. 41.407 yang mereka keluarkan satu hari untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Dari pendapatan rata-rata yang mereka terima setiap bulan untuk tahun 2021 sebanyak Rp. 2.314.664 per bulan hanya Rp.1.084.305 pengeluaran. Secara ekonomi sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran, maka masyarakat akan menabung atau berinvestasi.

Dari data diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan awal yaitu masyarakat Padang Pariaman membatasi pengeluaran harian mereka termasuk pengeluaran untuk pendidikan anak-anaknya, namun memiliki kemampuan untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah karena meskipun pendapatan masyarakat Padang pariaman masih dibawah rata-rata, namun mereka lebih cenderung untuk menabung atau berinvestasi dan mengabaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka yaitu pemenuhan kebutuhan yang sesuai standar seperti makan empat sehat lima sempurna serta kebutuhan penting seperti untuk pendidikan. Selanjutnya kualitas pendidikan di Padang Pariaman juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Data tentang Angka Partisipasi murni ini untuk SD dan SMP dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Angka Partisipasi Murni.

Tahun	APM	Sekolah
2021	99,36	SD
2022	98,99	SD
2023	99,26	SD
2021	76,77	SMP
2022	77,18	SMP
2023	77,27	SMP

Sumber: Padang Pariaman 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa APM untuk SD sudah tinggi artinya sudah banyak anak yang berusia sekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan SD. Nilai idealnya seharusnya 100% yang berarti tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ini tentu saja menjadi keresahan berikutnya yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman bahwa di Padang Pariaman APM untuk SD belum bisa mencapai 100%. Untuk tingkat SMP , APM lebih rendah dari di SD. Hal ini menunjukkan masih banyak anak-anak yang tidak sekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan SMP. Tentu saja ini menjadi keresahan bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena data-data diatas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Padang Pariaman memang masih rendah.

Selain masalah eksternal yang ditemukan, dalam temuan internal yaitu berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pengawas bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Setiap bidang telah ditugasi oleh Kepala Dinas, namun perhatian terhadap mutu pendidikan masih kurang dibenahi, seperti pengawas sekolah yang seharusnya tugas Kepala Dinas harus memberikan evaluasi kepada setiap pengawas yang turunkan di sekolah, namun tidak dievaluasi. Sehingga pengawas yang turun tersebut tidak secara berkesinambungan dan biasanya mereka turun berdasarkan hati nurani masing-masing. Kepala dinas yang menjabat, dilihat dari latar belakang banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang dijalankan selama ini, sehingga untuk giat terhadap pendidikan kurang pas atau kurang solid dengan penyelesaian masalah yang sering terjadi. Dilihat dari angka yang diturunkan dengan kebutuhan dari sekolah sendiri berbanding terbalik, yaitu sangat tidak sesuai, sehingga masih banyak keluarga yang mengeluhkan bahwa sekolah tidak adil dengan bantuan kepada siswa, karena angka dari Dinas pada awalnya akan berubah angka jika sampai pihak Sekolah. Sehingga dana BOS sebenarnya belum terselesaikan secara baik. Dana yang dialokasikan untuk sarpras sebenarnya hanya dana BOS, yang mana dana BOS digunakan untuk keperluan semua siswa, yaitu semua siswa tidak membeli buku yang artinya semua peralatan sekolah seperti buku paket dibiayai dari

Dana BOS. Sedangkan untuk bangunan Mushola, perpustakaan, WC merupakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Dana DAK belum tersalurkan secara merata, hal ini dikarenakan DAK sendiri berbeda dengan dana BOS. BOS ke semua sekolah, namun DAK tersebut merupakan kemampuan dari KEPSEK masing-masing sekolah memberikan proposalnya kepada DISPEND. Jika KEPSEK memiliki kedekatan ataupun memiliki kemampuan berbicara dengan DISPEND maka DAK akan dapat tersalurkan. Pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB) belum terarahkan, hal ini masih menjadi masalah, munculnya kurikulum merdeka, yang mana pada guru harus mampu untuk menguasai kurikulum belum terlaksana dengan baik, hal ini sebenarnya juga masalah dari Dinas Pendidikan, karena belum memunculkan pengawas yang mampu untuk memberikan para guru pengembangan tersebut, karena pengawas malas untuk mengembangkan diri juga.

METODE

Jenis penelitian dikategorikan penelitian survey dan evaluasi, yaitu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi yang akurat dan objektif yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan pendidikan di wilayah dan melakukan evaluasi dengan melahirkan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Secara umum informan penelitian adalah (1) masyarakat yang memiliki anak usia sekolah baik yang sekolah ataupun tidak bersekolah (2) aparat nagari (wali nagari, wali korong, dan pejabat desa lainnya), (3) siswa-siswa yang bersekolah, (4) anak remaja usia sekolah tetapi tidak bersekolah, (5) Dinas pendidikan, (6) dan informan pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Pendekatan yang digunakan terhadap informan diutamakan secara informal melalui silaturahmi. Penelitian mengikuti informan dalam berbagai kegiatan sekolah. Wawancara mendalam dilakukan terhadap responden yang ditentukan dengan teknik bola salju (*snowball sampling*) sampai kritik jenuh. Sugiyono(2005:54)mengemukakan bahwa teknik bola salju (*snowball sampling*) adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian dan pembahasan tentang menemukan solusi- solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

1. Analisis Usia Sekolah Permasalahan utama dalam hal Usia sekolah:Usia sekolah merupakan usia yang membutuhkan cara dan strategi Sulitnya sekolah dalam memberikan pendidikan terhadap siswa dengan usia lebih rendah Sulitnya memberikan bimbingan dan arahan terhadap siswa berusia SMP dan SMA karena pengaruh perkembangan zaman, teknologi, pubertas Jumlah calon siswa yang berbeda-beda di tiap wilayah menyebabkan ada beberapa sekolah yang minim siswa.
2. Perekonomian Masyarakat: Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, sehingga berpengaruh dalam hal memberikan dukungan kepada anak, Banyaknya tunggakan pembayaran buku ataupun baju pada kebanyakan sekolah, Perekonomian yang lemah menjadikan kurangnya semangat masyarakat dalam menyekolahkan anaknya, Rendahnya keahlian masyarakat untuk dapat dikembangkan Pesain dan lahan kerja yang sempit.
3. Analisis Pandangan dan Dukungan Masyarakat: Analisis Permasalahan utama dalam hal Pandangan dan dukungan masyarakat, Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap guru dan kualitasnya, Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap materi yang diberikan terhadap anak, Sekolah dianggap kurang transparan dalam hal penyediaan materi pelajaran serta pendanaan. Masih ada sekolah yang menggunakan lahan warga sebagai lapangan/parkiran.

4. Analisis Tata Kelola Sekolah: Permasalahan utama dalam hal tata kelola terkait Kurang transparannya dalam penggunaan dana sekolah seperti dana komite dan BOS, Kedisiplinan guru yang masih rendah, Belum adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar di lingkungan sekolah, Kurangnya anggaran pendidikan yang memadai untuk mengatasi kebutuhan sekolah. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Ketidakhomogenan dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran antara guru, Tidak adanya program pendampingan dan bimbingan akademik yang memadai. Ketidakkonsistenan dalam penerapan manajemen pendidikan yang baik. Belum adanya program yang fokus pada pengembangan kecerdasan emosional siswa. Kurangnya keterlibatan orangtua dalam kegiatan sekolah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi dan perkembangan terkini. Belum adanya penerapan sistem penilaian yang objektif dan transparan. Tingkat kehadiran siswa yang rendah. Tidak adanya penerapan sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi oleh siswa Tidak adanya pemberdayaan guru sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran.
5. Budaya Masyarakat: Budaya masyarakat tidak jauh berbeda dengan penilaian pandangan masyarakat Dimana masyarakat mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan sekolah namun minimnya kepercayaan dan pendanaan menjadikan kegiatan sekolah menjadi terhambat Kegiatan-kegiatan ke masyarakat kurang diperlihatkan ke siswa karena minimnya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam mendidik anak. Keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah Budaya masyarakat dalam hal pewarisan tradisi yang masih kurang karena masalah modernisasi dan globalisasi. Kurangnya pelatihan dan pendidikan diberikan kepada masyarakat dalam hal mengikuti perkembangan pendidikan era dewasa ini sehingga masyarakat kurang mengikuti perkembangan dunia pendidikan

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, pembahasan ini menganalisis hubungan antara kebijakan pendidikan, kondisi ekonomi, tata kelola sekolah, dan budaya masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Hasilnya menunjukkan interaksi kompleks yang memengaruhi kualitas pendidikan di berbagai jenjang.

Dinamika Usia Sekolah dan Tantangannya

Penerimaan siswa di Padang Pariaman umumnya mengikuti aturan usia Dapodik (6-7 tahun untuk SD), tetapi terdapat fleksibilitas adaptif di beberapa SD melalui skema "penitipan" bagi anak di bawah usia 6 tahun. Meskipun memberi peluang, skema ini menciptakan risiko anak tidak terdata secara resmi dan memerlukan komunikasi transparan dengan orang tua. Pada jenjang SMP dan SMA, tantangannya lebih kompleks. Siswa SMP (12-13 tahun) memasuki masa pubertas, yang memengaruhi fokus belajar dan perilaku sosial, sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Di tingkat SMA, kebijakan usia maksimum 21 tahun untuk sekolah negeri menjadi tantangan, mendorong siswa yang melebihi batas usia ke sekolah swasta atau lembaga lain. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang tegas namun tetap memberikan solusi alternatif bagi siswa.

Kondisi Ekonomi dan Dukungan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil menjadi tantangan struktural. Keterbatasan pendapatan berdampak pada ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak, meskipun semangat mereka tinggi. Temuan menarik dari beberapa SD adalah persepsi keliru bahwa semua biaya ditanggung oleh dana BOS. Namun, ada juga dukungan positif dari pemerintah nagari dan berbagai program beasiswa (Baznas, KIP, PKH), serta bantuan alumni, yang sangat membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

Meskipun demikian, pandangan konservatif sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan kurang penting masih menjadi kendala. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam **gotong royong** dan hibah tanah untuk sekolah menunjukkan potensi kolaborasi yang kuat. Namun, kurangnya kepercayaan pada guru dan sekolah karena masalah kedisiplinan serta kekhawatiran biaya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik.

Tata Kelola Sekolah dan Pengaruh Budaya

Tata kelola sekolah di Padang Pariaman menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dalam pengawasan guru dan pemanfaatan sarana prasarana. Kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan listrik di beberapa wilayah memperburuk proses pembelajaran. Di tingkat SMP dan SMA, pengawasan orang tua di rumah dan penerapan sanksi yang tegas masih belum optimal. Hal ini diperkuat oleh analisis SWOT yang mengidentifikasi tata kelola yang lemah sebagai kelemahan utama, di tengah kekuatan seperti dukungan pemerintah dan kurikulum yang relevan.

Selain itu, budaya masyarakat memiliki dampak langsung pada pendidikan. Tradisi seperti "berburu babi hutan" di kalangan masyarakat Minang secara tidak langsung memengaruhi kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah, karena mereka sering membolos atau datang dalam kondisi mengantuk. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dengan kewajiban pendidikan, melalui komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pengintegrasian nilai-nilai budaya positif ke dalam pendidikan karakter juga menjadi peluang besar untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan diterima.

Kebijakan:

- 1) Perlu buku penghubung antara guru dan orang tua yang berisikan indikator penilaian kemajuan siswa dari segi afektif, psikomotor dan kognitif.
- 2) Guru memberikan matrik dan program pendidikan dan pembelajaran kepada orang tua agar dapat disesuaikan dengan harapan orang tua dan masyarakat.
- 3) Menerapkan sistem pendidikan seperti sekolah swasta, adanya target khusus dan pembinaan yang berkelanjutan.
- 4) Melibatkan orang tua dalam menyusun program pendidikan kreatif Analisis.
- 5) Adanya bantuan-bantuan UKM untuk masyarakat yang ditindaklanjuti perkembangannya.
- 6) Setiap bantuan UKM ada bentuk pertanggungjawaban yang ketat.
- 7) Adanya rekomendasi dari dinas terkait untuk memberikan pelatihan pelatihan kepada masyarakat dan ada bentuk produk yang dihasilkan. Program ini harus ada tindak lanjut dan bentuk pertanggungjawaban.
- 8) Adanya pihak yang mengakomodir remaja-remaja putus sekolah dibawah dinas terkait.
- 9) Adanya pemberian sanksi tegas terhadap para pendidik yang tidak disiplin dan berada di luar sekolah pada jam sekolah.
- 10) Adanya pelaporan hasil belajar siswa dalam bentuk pertemuan langsung orang tua dengan guru dalam forum seperti rapat akhir semester, tidak hanya pada laporan tertulis.
- 11) Sekolah tidak semata memberikan pendidikan dalam bentuk kognitif tetapi juga pada perkembangan karakter, religius, dan keterampilan.
- 12) Melibatkan orang tua dalam menyusun program belajar semester/tahunan.
- 13) Kepala sekolah memberi dukungan bagi guru untuk mengembangkan SDM, dengan mendatangkan berbagai narasumber dari berbagai keahlian setiap periode tertentu.
- 14) Adanya alokasi dana rutin untuk pengembangan SDM guru serta guru yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri ditagih laporan kegiatan dan karyanya.
- 15) Adanya reward dan punishman yang ketat untuk pendidik dan kepala sekolah.
- 16) Kepala sekolah harus menghasilkan project yang bermanfaat untuk pengembangan guru dan kualitas pendidikan secara berkala.
- 17) Adanya program 1 semester 1 karya.
- 18) Orang tua siswa dilibatkan dalam menyusun program pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

- 19) Orang tua dan masyarakat ikut dalam proses evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam kegiatan monitoring oleh orang tua siswa.
- 20) Sekolah memberikan kesempatan, ruang, waktu dan dana dalam setiap kegiatan adat-tradisi yang turun temurun seperti melibatkan siswa dalam tradisi atau budaya daerah.
- 21) Kerjasama yang kuat antar sekolah, orang tua dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kartu/buku penghubung

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berasal dari internal sekolah tetapi juga dari faktor eksternal seperti ekonomi dan budaya masyarakat. Implementasi kebijakan usia sekolah, meskipun berpedoman pada Dapodik, masih memerlukan fleksibilitas yang bijak, terutama di tingkat SD, untuk mengakomodasi minat belajar anak tanpa mengorbankan integritas data. Di sisi lain, tantangan pubertas dan batasan usia di jenjang SMP dan SMA menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik.

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, meskipun menunjukkan potensi menabung, secara nyata menjadi hambatan struktural karena memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal ini diperparah oleh pandangan konservatif sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Tata kelola sekolah, khususnya dalam hal pengawasan guru, penggunaan anggaran, dan pemanfaatan teknologi, masih memiliki kelemahan yang signifikan. Terakhir, budaya masyarakat, meskipun kaya akan tradisi, dapat memiliki dampak negatif pada konsentrasi belajar siswa, seperti pada kasus tradisi berburu.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman:

1. **Penguatan Kolaborasi dan Komunikasi:** Perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Buku penghubung dan pertemuan rutin dapat menjadi media efektif untuk memastikan keselarasan program pendidikan dan harapan orang tua.
2. **Peningkatan Tata Kelola Sekolah:** Dinas Pendidikan harus menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja kepala sekolah dan guru. Sekolah harus didorong untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pendidik yang tidak disiplin dan mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru secara berkala.
3. **Kebijakan Pendidikan yang Adaptif:** Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya terfokus pada administrasi, tetapi juga pada solusi konkret untuk masalah usia, ekonomi, dan budaya. Hal ini mencakup penerapan sistem pendidikan yang kreatif, alokasi dana untuk pengembangan guru yang terukur, dan pelibatan orang tua dalam penyusunan program.
4. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Diperlukan program bantuan UKM yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini harus disertai dengan pertanggungjawaban yang ketat dan pelatihan-pelatihan yang relevan agar masyarakat memiliki keahlian baru.
5. **Integrasi Budaya dalam Pendidikan:** Sekolah harus diberikan ruang dan dukungan untuk mengintegrasikan kegiatan adat dan budaya lokal ke dalam kurikulum. Ini tidak hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa. Selain itu, diperlukan pendekatan yang bijak untuk mengatur tradisi masyarakat yang berpotensi mengganggu kegiatan sekolah.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, H. (2018). Proses Pendidikan/pembelajaran. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(1), 19-26
- Ary H.Gunawan.(2000).Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang. Pelbagai Problem Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.
- BKKBN, Profil, Hasil Pendataan Keluarga Tahun (2012). Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2013.
- Depdiknas. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Fahim, A.,Tan, Q.,Naz, B., Ain, Q.U.,& Bazai, S. U.(2021).Sustainablehigher education reform quality assessment using SWOT analysis with integration ofAHPandentropy models:Acasestudyof Morocco. *Sustainability*, 13(8), 4312.
- Garnika, E., & Rohiyatun, B. (2021). Implementasi Analisis Swot Dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*,4(2), 162- 169.
- Gaspersz,Vincent.(2011).Total Quality Management (untuk Praktisi Bisnis dan. Industri). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, 7(1).
- Mulyasa. (2002).*Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nawawi, Ismail.(2009). *Ekonomi Islam-Perspektif Teori,Sistem,dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Rupaedi, A. (2012). Peranan Pengawas Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Indramayu.
- Saat, S. (2015). Faktor-faktor determinan dalam pendidikan (studi tentang makna dan kedudukannya dalam pendidikan).*Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*,
- Sallis. Edward. (2008). *Total Quality Management in Education*. London: Philadelphia.
- Sudrajat, H. (2005). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*.Bandung: Cipta Cekas Grafika.
- Sukmadinata,Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Suksup, C., Pimdee, P., & Sirijarupat, P. (2020). Educational Human Resource Management Strategy SWOT Analysis for Thailand's OBEC. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 105-120.
- Supriyanto, A. (2016). Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Diseminasi Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4).

Susanti, E. (2018). *Implementasi analisis swot dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan dimadrasahtsanawiyahnegeri2 kota palembang* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

Suyanto, Bagong Sutinah.(2010). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai. Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group